

Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia

Hengky Leon

Email: hengkyleon11@gmail.com

STIE Widya Dharma Pontianak

Abstract

Corporate governance is a series of good relations between management, shareholders and all interested parties against the company in order to optimize the value of the company in a professional manner. The purpose of the research is to measure the implementation of corporate governance practices against financial performance on the company property and real estate was listed on the Indonesia stock exchange. The size that is used consists of institutional ownership percentage, the number of commissioners, the board of directors, the audit committee and return on equity. Analysis tools are used in the research using the SPSS program. Method of determination of samples is purposive sampling where there are 90 observation data. The analysis used in the SPSS program is descriptive analysis, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, multiple linear regression, f test, and t-test. As for the results of the research conducted is a regression model already are BLUE and have a specification of goodness fit model. Institutional ownership has no effect against return on equity, the board of commissioners of influential positively against return on equity, the board of directors has no effect against return on equity and the audit committee has no effect against return on equity.

Keywords: *corporate governance, institutional ownership, board of commissioner, board of director, audit committee, return on equity*

A. Pendahuluan

Good corporate governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pada pengelolaan perusahaan perusahaan secara profesional berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, serta kewajaran dan kesetaraan. Tujuan utama dilaksanakannya *good corporate governance* ini adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam waktu jangka panjang. Alasan *good corporate governance* ini diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran-saran atas bentuk pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Direksi.
2. Sebagai pedoman bagi Dewan Direksi agar dalam menjalankan perusahaan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, anggaran dasar dan etika bisnis.
3. Sebagai pedoman bagi jajaran manajemen dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Di Indonesia, konsep *good corporate governance* mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997-1998 karena tidak dikelolanya perusahaan secara bertanggung jawab serta mengabaikan regulasi. Bermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat, yang mewajibkan untuk pengangkatan komisaris independen dan pembentukan komite audit.

Pada tahun 1998, *good corporate governance* mulai dikenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia.

Kunci sukses dan kesinambungan dari implementasi *good corporate governance* di Bursa Efek Indonesia adalah berfungsinya organ-organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Komite Remunerasi, Satuan Pemeriksa Internal (SPI), Sekretaris Perusahaan, Komite Perdagangan dan Penyelesaian Transaksi Efek, Komite Penilai Perusahaan, Komite Disiplin Anggota, Komite Penasihat Investasi, Audit Eksternal, dan Manajemen Risiko secara efektif. Untuk itu diperlukan suatu pedoman tata kelola perusahaan (*code of corporate governance*) yang merupakan himpunan pokok-pokok pengelolaan perseroan yang menjadi acuan implementasi *good corporate governance* Bursa Efek Indonesia.

Good corporate governance adalah suatu sistem atau struktur yang menerapkan prinsip-prinsip:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pelaksanaan pengambilan keputusan. Transparansi secara lebih spesifik meliputi, namun tidak terbatas pada aspek-aspek berikut:
 - a. Perseroan akan menyediakan informasi secara tepat waktu, jelas dan akurat, termasuk di dalamnya adalah kinerja dan kondisi keuangan perseroan.
 - b. Perseroan akan memberi kemudahan akses bagi pemegang saham maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebijakan perseroan. Informasi tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perseroan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, praktik *good corporate governance*, dan kejadian penting yang dapat memengaruhi kondisi perseroan.
 - c. Prinsip transparansi tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban bagi perseroan untuk merahasiakan informasi tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau atas dasar pertimbangan bisnis.
 - d. Perseroan secara tertulis dan proporsional mengkomunikasikan kebijakan perseroan kepada *stakeholders* yang relevan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab organ perseroan sehingga perseroan dapat berjalan dengan efektif. Akuntabilitas secara lebih spesifik meliputi, namun tidak terbatas pada aspek-aspek berikut:
 - a. Perseroan menjabarkan fungsi, tugas dan tanggung jawab tiap organ secara tertulis, jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai serta strategi perseroan.
 - b. Perseroan memastikan pelaksanaan *check and balance system* dan pengendalian internal di masing-masing fungsi.
 - c. Perseroan meyakini bahwa semua organ perseroan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*.
 - d. Perseroan menyusun satuan pengukuran kinerja tiap organ secara memadai dan seimbang.
 - e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perseroan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perseroan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perseroan yang sehat. Pertanggungjawaban secara lebih spesifik meliputi, namun tidak terbatas pada aspek-aspek berikut:
 - a. Tiap organ perseroan dalam aktivitasnya selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perseroan.

- b. Perseroan melaksanakan fungsi tanggung jawab sosial dengan didukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.
- 4. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan perseroan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan, intervensi dan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengambilan keputusan penting perseroan. Independensi secara lebih spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada aspek-aspek berikut:
 - a. Perseroan menghindari adanya dominasi tidak wajar dari pemegang saham maupun *stakeholders* lainnya.
 - b. Perseroan melaksanakan pengambilan keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- 5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), yaitu kewajaran dan kesetaraan hak dan kewajiban pemegang saham dan *stakeholders*. Kewajaran dan kesetaraan secara lebih spesifik, meliputi, namun tidak terbatas pada aspek-aspek berikut:
 - a. Perseroan memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemegang saham dan *stakeholders*.
 - b. Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada pemegang saham dan *stakeholders* untuk memberikan masukan, menyampaikan pendapat serta mendapatkan akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi sesuai fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki.
 - c. Perseroan memberikan kesempatan yang wajar dan setara dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Menurut Purba (2009: 14) laporan keuangan yang lengkap terdiri neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi atau laporan laba komprehensif (berdasarkan *International Financial Reporting Standards* atau IFRS), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 pasal 69 ayat 3 menegaskan bahwa apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga laporan keuangan menyesatkan, maka Dewan Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab renteng terhadap pihak yang dirugikan. Menurut Atmaja (2003: 411) para *stakeholders* perlu mengetahui bagaimana kinerja perusahaan. Untuk itu mereka bergantung pada laporan keuangan perusahaan yang diumumkan secara periodik untuk menyediakan informasi mendasar tentang kinerja keuangan perusahaan. Menurut Sawir (2005:2) laporan keuangan adalah media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan. Menurut SAK, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
 - a. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.
 - b. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Di dalam keuangan perusahaan, laba atas ekuitas merupakan ukuran dari profitabilitas dari suatu bisnis dimana kaitannya dengan ekuitas atau modal perusahaan, juga dikenal sebagai aset bersih dikurangi dengan kewajiban. Laba atas ekuitas ini merupakan ukuran seberapa baik bagi perusahaan dalam menggunakan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan laba bagi perusahaannya. Kasmir (2011: 204) menyatakan bahwa hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti lain yang sudah dikembangkan sebelumnya. Yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) penggunaan variabel independen berupa persentase kepemilikan saham mayoritas, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit; (2) objek penelitian berupa perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan tersebut dipilih dikarenakan pada awal tahun 2014, kondisi ekonomi memasuki fase booming dan mengalami kelesuan serta mengambil data kinerja selama dua tahun terakhir (2016-2017) sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji datanya lebih lanjut; (3) tahun penelitian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan urutan penulisan sebagai berikut. Pertama, pendahuluan menjelaskan latar belakang permasalahan serta maksud dan manfaat dari penulisan. Kedua, menguraikan teori dan hasil empiris sebelumnya sebagai dasar pengembangan hipotesis dan pembentukan model penelitian. Ketiga, menguraikan metode penelitian yang terdiri dari atas bentuk penelitian, data penelitian, sumber data, metode penentuan sampel, indentifikasi variabel dan analisis data. Keempat, hasil penelitian yang berisi pembahasan dan interpretasi pengujian hipotesis. Kelima, penutup yang berisikan kesimpulan dan pemberian saran untuk penelitian selanjutnya.

B. Landasan Teoritis dan Hipotesis

Teori Agensi

Menurut Purba (2009:43) *agency relationship* adalah hubungan antara pemegang saham dan direksi perusahaan. Kepentingan direksi perusahaan dan pemegang saham tidaklah sama dan sering berbenturan.

Menurut Harmono (2011:2) teori keagenenan menunjukkan bahwa kondisi informasi yang tidak lengkap dan penuh ketidakpastian akan memunculkan masalah keagenan yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* adalah kondisi yang menunjukkan posisi *principal* tidak mendapatkan informasi secara cermat mengenai kinerja manajemen yang telah menetapkan pembayaran gaji bagi manajemen atau program kompensasi lain. *Moral hazard* berkaitan dengan kondisi *principal* tidak mendapatkan kepastian bahwa manajemen telah berupaya bekerja semaksimal untuk kepentingan pemilik.

Good Corporate Governance

Menurut Purba (2009:43) tata kelola perusahaan yang baik atas suatu perusahaan juga akan memengaruhi rentan tidaknya suatu perusahaan terhadap risiko kegagalan. Masalah *good corporate governance* hingga saat ini masih menjadi isu besar perusahaan-perusahaan modern. *Good corporate governance* akan tercapai apabila peranan *Chief Executive Director* (CEO) atau pengelola ditingkatkan dan tidak berada dibawah bayang-bayang pemilik perusahaan.

Menurut Kumaat (2011:22) *corporate governance* adalah istilah yang dipopulerkan pertama kali oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1992. Kemudian oleh *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) diadopsi menjadi 4 prinsip *good corporate governance* yaitu kewajaran (*fairness*), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*). *Good corporate governance* sudah menjadi prasyarat mutlak bagi setiap korporasi yang terdaftar di Bursa Saham atau yang terjun ke industri atau bisnis yang diberlakukan regulasi pemerintah atau asosiasi dimana perusahaan tergabung seperti perbankan, multifinansial, jasa konstruksi dan sebagainya.

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Return On Equity*

Kepemilikan Institusional memiliki peranan dalam membawa ke arah mana sebuah entitas akan terus dikembangkan sehingga perlu ada pengawasan secara berkala agar para investor tetap mengalokasikan dananya untuk melakukan investasi maupun perencanaan ekspansi secara lebih lanjut sehingga secara tidak langsung memiliki andil dalam pembentukan kinerja keuangan yang baik. Menurut Puspitasari dan Ernawati (2010) kepemilikan berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* dan menurut Jati (2009) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity*. Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Return On Equity*

2. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Praktik *Return On Equity*

Dewan Komisaris memiliki peranan dalam pengawasan dan pemberian masukan kepada Dewan Direksi. Dewan Komisaris tidak mempunyai otoritas langsung kepada perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris memiliki peranan untuk mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja Dewan Direksi. Oleh sebab itu, posisi Dewan Komisaris sangat penting dalam menghubungkan kepentingan pemegang saham dalam sebuah entitas. Menurut Puspitasari dan Ernawati (2010) ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Return On Equity*. Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Return On Equity*

3. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Return On Equity*

Dewan Direksi mempunyai peranan yang cukup vital di dalam suatu entitas. Dengan adanya pemisahan tugas dengan Dewan Komisaris, Dewan Direksi memiliki peranan yang cukup besar dalam pengelolaan sumber daya dalam perusahaan serta Dewan Direksi memiliki peran untuk menetapkan arah dari kebijakan serta strategi sumber daya perusahaan baik untuk penetapan rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Jati (2009) ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity*. Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap *Return On Equity*

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Return On Equity*

Komite Audit mempunyai peranan yang cukup penting bagi entitas. Karena komite audit bukan hanya suatu syarat sebagai pembentukan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek saja namun penggunaan untuk pengawasan internal perusahaan yang bisa dimaksimalkan terutama kepada perusahaan yang sudah memiliki lingkup yang luas dan beragam. Menurut Jati (2009) komite audit tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity*. Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Return On Equity*

C. Metode Penelitian

1. Pemilihan Sampel

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2017. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yang dipilih berdasarkan kriteria perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017 dan mempublikasikan data laporan keuangan *good corporate governance* dan data laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode 2016-2017. Jumlah sampel perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel adalah 45 perusahaan dengan jumlah data observasi sebanyak 90 data.

2. Identifikasi Variabel

a. Return On Equity (ROE)

Menurut Margaretha (2005: 21): *Return on equity* (ROE) merupakan cara mengukur tingkat pengembalian atas investasi bagi pemegang saham biasa. Rumus ROE dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \text{Earning After Tax} / \text{Common Equity}$$

Menurut Van Horne dan Warchowicz (2005: 225): *Return on equity* (ROE) atau pengembalian atas ekuitas merupakan pengukuran ringkasan lainnya atas kinerja keseluruhan perusahaan. Rumus ROE dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \text{Laba Setelah Pajak} / \text{Ekuitas Pemegang Saham}$$

Selain itu diungkapkan juga oleh Harmono (2011: 110) bahwa konsep profitabilitas ini dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen. Sesuai dengan perkembangan model penelitian bidang manajemen keuangan, umumnya dimensi profitabilitas memiliki hubungan kausalitas terhadap nilai perusahaan.

b. Kepemilikan Institusional

Menurut Kertonegoro (2000:14) mendefinisikan investor institusional adalah lembaga-lembaga finansial seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank komersial dan lembaga tabungan. Investor institusional lebih besar kemauannya untuk mentransfer dana keluar batas-batas nasional untuk memperbaiki peluang risiko hasil dari portofolio yang mencakup aset finansial dari *issuer* luar negeri. Untuk penentuan indentifikasi variabel kepemilikan institusional menggunakan persentase kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Dewan Direksi.

Menurut Samsul (2006:72) komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Dewan komisaris wajib memberikan rekomendasi perbaikan atau saran dan menyampaikannya kepada seluruh anggota direksi perusahaan tercatat yang bersangkutan, selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah dewan komisaris menerima laporan akhir hasil penelaahan komite audit dengan melampirkan hasil penelaahan dimaksud.

Menurut Sawyer, Dittenhofer dan Scheiner (2006a:502) posisi yang diduduki oleh komisaris masa kini bukanlah suatu tempat yang menyenangkan. Mereka harus memikul beban tanggung jawab yang semakin besar. Hukum mengharuskan mereka melindungi para pemegang saham dan membuat pertimbangan bisnis dengan penuh perhitungan, tidak hanya memberikan cap stempel begitu saja pada keputusan para manajemen eksekutif. Untuk penentuan indentifikasi variabel dewan komisaris menggunakan jumlah orang dari dewan komisaris yang ada di dalam perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (termasuk komisaris independen).

d. Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menurut Brealey dan Myers (2006:17) dewan direksi sering digambarkan sebagai pendukung manajemen puncak yang pasif. Jika pemegang saham percaya bahwa perseroan berkinerja rendah dan bahwa dewan direksi tidak cukup agresif mengawasi manajer bertugas, mereka bisa mencoba mengganti dewan pada pemilihan berikutnya.

Menurut Boynton, Johnson dan Kell (2003:58) direksi suatu perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan dioperasikan dengan cara terbaik untuk kepentingan pemegang saham. Hubungan auditor dengan para direktur sebagian besar tergantung pada komposisi dewan itu sendiri.

Menurut Mardiasmo (2015b:6) untuk direksi seharusnya hanya memperhatikan kinerja perusahaan secara keseluruhan dari perspektif pemegang saham seperti *total shareholder return*, *wealth added index*, *market value added*, dan *market to book ratio*. Ketika target diturunkan ke tingkat yang lebih rendah dari Direksi, penetapan target dan penghargaan harus dikaitkan agar dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai target.

Menurut Mardiasmo (2015a:9) meskipun para manajemen senior memiliki tanggung jawab utama dalam penyusunan serta implementasi strategi perusahaan, pada akhirnya hal ini merupakan tanggung jawab besar Dewan Direksi untuk memastikan bahwa tugas manajemen strategik dilaksanakan untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain. Empat kewajiban penting Dewan Direksi perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1) Secara kritis harus menilai pendekatan-pendekatan bisnis, strategi serta kemana perusahaan akan dibawa.
- 2) Memberikan evaluasi atas kaliber dan keterampilan kepemimpinan para eksekutif seniornya.

- 3) Membuat rencana kompensasi bagi para eksekutif puncak yang berhasil memberikan hasil yang sangat baik bagi pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham,
- 4) Mengawasi praktik-praktik laporan keuangan dan akunting perusahaan.
Untuk penentuan indentifikasi variabel dewan direksi menggunakan jumlah orang dari dewan direksi yang ada di dalam perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (termasuk direksi afiliasi).

e. Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Menurut Samsul (2006:72) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat. Komite audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Menurut Sawyer, Dittenhofer, dan Scheiner (2006b:520) komite audit akan melakukan *interface* dengan manajemen, auditor eksternal dan auditor internal. Suatu komite audit yang canggih dapat melaksanakan kontak dan rapat-rapat ini dengan sangat sukses. Suatu komite audit yang tidak berpengalaman dapat menimbulkan konflik yang serius atau yang paling baik membuang-buang waktu dari ketiga kelompok tadi.

Menurut Boynton, Johnson dan Kell (2003:58) komite audit yang ditunjuk terutama terdiri dari anggota yang berasal dari luar dewan, dapat bertindak sebagai penghubung antara auditor dan manajemen. Selama dekade yang lalu, terdapat kecenderungan meningkatnya penggunaan komite audit sebagai alat untuk memperkuat independensi auditor. Untuk penentuan indentifikasi variabel komite audit menggunakan jumlah orang dari komite audit yang ada di dalam perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

D. Hasil Penelitian

Dari Tabel 1 dapat dilihat gambaran data observasi berupa jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan ukuran penyebaran data.

Tabel 1
Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROE	90	-,1165	,4116	,071730	,0925638
Kepemilikan Institusional	90	,0659	,8856	,433668	,2099310
Dewan Komisaris	90	2	18	4,48	2,597
Dewan Direksi	90	2	12	4,94	1,795
Komite Audit	90	2	4	2,94	,313
Valid N (listwise)	90				

Model regresi linier disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian disebut dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang harus terpenuhi dalam model regresi linier yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi agar hasil analisis regresi dapat dikatakan bersifat BLUE (*best linear unbiased estimator*). Dalam pengujian ini, data residual telah terdistribusi normal, variabel independen tidak terjadi multikolinearitas, model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, dan model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,08159650
	Absolute	,138
Most Extreme Differences	Positive	,138
	Negative	-,076
Kolmogorov-Smirnov Z		1,306
Asymp. Sig. (2-tailed)		,066

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Kepemilikan Institusional	,982	1,019
Dewan Komisaris	,756	1,323
Dewan Direksi	,895	1,117
Komite Audit	,774	1,291

a. Dependent Variable: ROE

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,008	,061		,132	,896
1 Kepemilikan Institusional	-,010	,029	-,039	-,359	,721
Dewan Komisaris	-,004	,003	-,165	-1,346	,182
Dewan Direksi	,005	,004	,155	1,375	,173
Komite Audit	,016	,022	,088	,731	,467

a. Dependent Variable: ABS_RES

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,472 ^a	,223	,186	,0834943	1,961

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Dewan Komisaris

b. Dependent Variable: ROE

Tabel 6
Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,170	4	,042	6,096	,000 ^b
1 Residual	,593	85	,007		
Total	,763	89			

a. Dependent Variable: ROE

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Dewan Komisaris

Uji F atau uji koefisien regresi digunakan untuk mengetahui spesifikasi kelayakan model regresi (*goodness of fit model test*) dimana model regresi sudah dalam bentuk yang baik atau belum baik. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap ROE. Hasil pengujian disimpulkan dua hal, Pertama, model regresi sudah memiliki spesifikasi kelayakan model regresi yang baik (*goodness of fit model test*). Hal ini terlihat pada nilai signifikansi pada tabel uji F memiliki nilai dibawah 0,05. Dalam hal ini, nilai signifikansi untuk model regresi tersebut adalah $0,00 < 0,05$. Kedua, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap ROE. Hal ini dikarenakan $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ yaitu sebesar $6,096 > 2,473$.

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji t dianggap akan berpengaruh jika nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel baik dalam posisi positif dan negatif sebaliknya jika nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel baik dalam posisi positif dan negatif maka akan dianggap tidak berpengaruh.

Tabel 7
Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,049	,089		,547	,586
kepemilikan institusional	,042	,043	,096	,998	,321
1 dewan komisaris	,015	,004	,420	3,815	,000
dewan direksi	,010	,005	,190	1,882	,063
komite audit	-,038	,032	-,128	-1,174	,244

a. Dependent Variable: ROE

Dalam Tabel 7 dijelaskan persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y' = 0,049 + 0,042 x_1 + 0,015x_2 + 0,010x_3 - 0,038x_4$$

Persamaan tersebut memiliki arti yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 0,049 yang berarti jika kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit bernilai nol maka ROE bernilai 0,049 atau 4,9 persen.
- b. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusional (b_1) sebesar 0,042 yang berarti bahwa setiap peningkatan kepemilikan institusional sebesar 1 persen, maka ROE akan meningkat sebesar 0,042 atau 4,2 persen dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap (tidak berubah).
- c. Nilai koefisien regresi variabel dewan komisaris (b_2) sebesar 0,015 yang berarti bahwa setiap peningkatan dewan komisaris sebesar 1 orang, maka ROE akan meningkat sebesar 0,015 atau 1,5 persen dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap (tidak berubah).
- d. Nilai koefisien regresi variabel dewan direksi (b_3) sebesar 0,010 yang berarti bahwa setiap peningkatan dewan direksi sebesar 1 orang, maka ROE akan meningkat sebesar 0,010 atau 1 persen dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap (tidak berubah).
- e. Nilai koefisien regresi variabel komite audit (b_4) sebesar -0,038 yang berarti bahwa setiap peningkatan komite audit sebesar 1 orang, maka ROE akan menurun sebesar 0,038 atau 3,8 persen dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap (tidak berubah).

Dari Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ROE (hipotesis pertama ditolak). Hal ini dikarenakan t hitung $<$ t tabel yaitu sebesar $0,998 < 1,987$. Hasil penelitian ini memiliki jawaban berbanding terbalik dengan penelitian Puspitasari dan Ernawati (2010) dan mendukung jawaban penelitian Jati (2009).
- b. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap ROE (hipotesis kedua diterima). Hal ini dikarenakan t hitung $>$ t tabel yaitu sebesar $3,815 > 1,987$. Hasil penelitian ini memiliki jawaban berbanding terbalik dengan penelitian Puspitasari dan Ernawati (2010).
- c. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap ROE (hipotesis ketiga ditolak). Hal ini dikarenakan t hitung $<$ t tabel yaitu sebesar $1,882 < 1,987$. Hasil penelitian ini mendukung jawaban penelitian dari Jati (2009).
- d. Komite audit tidak berpengaruh terhadap ROE (hipotesis keempat diterima). Hal ini dikarenakan t hitung $<$ t tabel yaitu sebesar $-1,174 < -1,987$. Hasil penelitian ini mendukung jawaban penelitian dari Jati (2009).

E. Kesimpulan

Penelitian mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sub sektor properti dan *real estate* selama periode 2016-2017 yang digambarkan dalam model regresi sudah bersifat BLUE (*best linear unbiased estimator*) karena model regresi yang diuji sudah mempunyai model yang terdistribusi normal, model tidak mengalami masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Dalam pengujian uji F, ada dua hal yang disimpulkan. Pertama, model regresi sudah memiliki spesifikasi kelayakan model regresi yang baik (*goodness of fit model test*) dikarenakan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Kedua, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh terhadap *return on equity* pada perusahaan sub sektor properti dan *real estate* selama periode 2016-2017. Hal ini dikarenakan F hitung $>$ F tabel yaitu sebesar $6,096 > 2,473$. Maka peneliti dapat menjelaskan bahwa jika salah satu pihak atau antar pihak tidak menjalankan dengan baik mengenai peran, tugas dan tanggung jawabnya maka bisa secara langsung maupun secara tidak langsung dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang telah dibangun

dimana hal itu terjadi bisa disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan, penyalahgunaan wewenang dan ataupun kurangnya pengawasan kinerja.

Dalam pengujian uji t hipotesis pertama, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ROE pada perusahaan sub sektor properti dan real estate selama periode 2016-2017. Maka hipotesis pertama ditolak. Hal ini dikarenakan t hitung $<$ t tabel yaitu sebesar $0,998 < 1,987$. Hasil penelitian ini memiliki jawaban berbanding terbalik dengan penelitian Puspitasari dan Ernawati (2010) dan mendukung jawaban penelitian Jati (2009). Hal ini dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang dimiliki oleh sub sektor ini belum dapat memberikan pengaruh terhadap laba atas ekuitas yang diharapkan oleh pemegang saham.

Dalam pengujian uji t hipotesis kedua, dewan komisaris berpengaruh positif terhadap ROE pada perusahaan sub sektor properti dan real estate selama periode 2016-2017. Maka hipotesis kedua diterima. Hal ini dikarenakan t hitung $>$ t tabel yaitu sebesar $3,815 > 1,987$. Hasil penelitian ini memiliki jawaban berbanding terbalik dengan penelitian Puspitasari dan Ernawati (2010). Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan dewan komisaris di perusahaan sub sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI sampai dengan saat ini sudah optimal dalam pengawasan terhadap pekerjaan dewan direksi dan menjadi jembatan penghubung yang baik antara pemegang saham dengan perusahaan serta menciptakan peran *good corporate governance* yang optimal bagi pemangku kepentingan.

Dalam pengujian uji t hipotesis ketiga, dewan direksi tidak berpengaruh terhadap ROE pada perusahaan sub sektor properti dan real estate selama periode 2016-2017. Maka hipotesis ketiga ditolak. Hal ini dikarenakan t hitung $<$ t tabel yaitu sebesar $1,882 < 1,987$. Hasil penelitian ini mendukung jawaban penelitian dari Jati (2009). Hal ini dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang diatur oleh dewan direksi pada sub sektor ini belum dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap laba atas ekuitas yang menjadi harapan bagi pemegang saham.

Dalam pengujian uji t hipotesis keempat, komite audit tidak berpengaruh terhadap ROE pada perusahaan sub sektor properti dan real estate selama periode 2016-2017. Maka hipotesis keempat diterima. Hal ini dikarenakan t hitung $<$ t tabel yaitu sebesar $-1,174 < -1,987$. Hasil penelitian ini mendukung jawaban penelitian dari Jati (2009). Hal ini dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang dipantau oleh komite audit pada sub sektor ini belum dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap laba atas ekuitas yang diharapkan oleh dewan direksi dan pemegang saham.

F. Keterbatasan dan Rekomendasi

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus pada satu sub sektor saja yaitu perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan analisa periode data selama dua tahun saja yaitu periode 2016-2017. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian menggunakan data sektor yang berbeda misalnya sektor *consumer goods* atau sektor finansial untuk melihat peran *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan sektor tersebut; (2) Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan jumlah tahun yang lebih banyak misalnya empat tahun atau lima tahun untuk memantau pergerakan indikasi dari kinerja keuangan secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Lukas Setia. 2003. *Manajemen Keuangan*, edisi ketiga revisi. Yogyakarta: Andi.
- Boynton, William C., Raymond M. Johnson and Walter G. Kell. 2003. *Modern Auditing*, edisi ketujuh, jilid 1 (judul asli: *Modern Auditing*), Seventh Edition. Penerjemah Penerbit Erlangga. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Brealey, Richard A. and Stewart C. Myers. 2004. *Principles of Corporate Finance*, Seventh Edition. Singapore: McGraw Hill Companies.
- _____. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, (judul asli: *Fundamental of Corporate Finance*). Penerjemah Penerbit Erlangga. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Harmono. 2011. *Manajemen Keuangan Berbasis Balance Scorecard*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jati, Framudyo. 2009. Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma*. Depok.
- Kertonegoro, Sentanoe. 2000. *Pasar Uang Pasar Modal*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- Kumaat, Valeri G. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Mardiasmo. 2015a. *Manajemen Strategik dan Kepemimpinan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- _____. 2015b. *Manajemen Keuangan Lanjutan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Margaretha, Farah. 2005. *Teori dan Aplikasi Manajemen Keuangan Investasi dan Sumber Dana Jangka Pendek*. Jakarta: Grasindo.
- Puspitasari, Filia dan Endang Ernawati. 2010. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Universitas Surabaya*. Surabaya. Vol 3 No. 2: 189-215.
- Purba, Marisi P. 2009. *Asumsi Going Concern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- RI, Keputusan Ketua Bapepam No. 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- RI, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Samsul, Mohamad. 2006. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Sawir, Agnes. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sawyer, Lawrence B., Mortimer A. Dittenhofer and James H. Scheiner. 2006a. *Audit Internal Sawyer*, edisi kelima, jilid 2 (judul asli: *Sawyer Internal Auditing*), Fifth Edition, jilid 2. Penerjemah Desi Adhariani. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- _____. 2006b. *Audit Internal Sawyer*, edisi kelima, jilid 3 (judul asli: *Sawyer Internal Auditing*), Fifth Edition, jilid 3. Penerjemah Desi Adhariani. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Van Horne, James C. dan John M. Wachowicz, JR. 2005. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan* (judul asli: *Fundamental of Financial Management*), edisi dua belas, jilid 1. Penerjemah Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary. Jakarta: Salemba Empat.

www.bi.go.id

www.idx.co.id